

ILMU ADMINISTRASI DITINJAU DARI ASPEK ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI

Oleh

Udaya Madjid *)

ABSTRAK

*I*LMU ADMINISTRASI merupakan hasil pemikiran penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni manusia. Sedangkan objek materialnya yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada hakekatnya perkembangan ilmu administrasi merupakan suatu kajian yang mendalam di alam nalar manusia yang dapat menembus cakrawala dunia dengan ditandai gerak langkah rasionalitas dibidang filsafat ilmu administrasi, baik secara ontologi yaitu nilai dasar pemikiran manusia yang menggambarkan tentang kebenaran dasar (apriori) dari pangkal pikir yang terkandung dalam ilmu administrasi itu sendiri. Epistemologi, perkembangan ilmu administrasi dalam pemikiran manusia terhadap rasionalitas melahirkan pandangan yang bercakrawala dan tidak dapat dijangkau sampai batas akhinya. Aksiologi, ilmu administrasi akan memberikan makna yang hakiki apabila dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga memberikan kemudahan dan kelayakan berpikir serta bertindak bagi manusia yang mendalami ilmu administrasi.

Kata kunci : administrasi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

PENDAHULUAN

Berfilsafat merupakan cara berpikir tentang sesuatu, berpikir tentang sesuatu yang berarti ingin mengetahui sesuatu, apa dan bagaimana? Ketika seseorang menanyakan pengertian (hakekat) tentang sesuatu, sesungguhnya ia sedang bertanya tentang bagaimana macam perkara.

Filsafat merupakan suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya (Suriasumantri, 1999). Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Selanjutnya menurut Socrates, bahwa filsafat merupakan sesuatu dari kegiatan berpikir dari awal sampai akhir. Akan tetapi tugas filsafat sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan melainkan mempersoalkan jawaban yang diberikan, sehingga kemajuan manusia dalam berfilsafat bukan saja diukur dari jawaban yang diberikan, tetapi juga dari pertanyaan yang diberikan.

Dalam filsafat terdapat tiga pertanyaan pokok, yakni tentang apa yang ingin diketahui (pertanyaan ontologi), bagaimana cara mendapatkan pengetahuan

tersebut (pertanyaan epistemologi) dan apa nilai kegunaannya (pertanyaan aksiologi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperhatikan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah ilmu administrasi ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI, DAN ILMU ADMINISTRASI

Ontologi

Menurut bahasa Yunani **ontologi** terdiri atas *onto* adalah benda yang ada, dan *logie* adalah ilmu tentang yang ada dan hakikat-hakikatnya. Bahasa Arab menyebut ilmu *el-kainat*, ilmu *el-maklumat* (Osman Raliby, 1982). Kata *onta* ini ialah kata Yunani *on* yang merupakan bentuk netral dari *oon*, dengan bentuk genetifnya *ontos*. Kata itu menurut Bakker (1992) bentuk partisipatif dari kata kerja *einei* yakni "ada" atau "mengada" yang berarti yang "ada" atau "mengada". *Einei* dan *to on* lambat laun tidak hanya berarti atau tidaknya, tetapi meliputi segalanya menurut segala bagiannya (segi-segi eksentif) dan menurut segala aspeknya (segi intensif).

Selanjutnya Praja (1993), menjelaskan bahwa ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Hakikat itu sendiri artinya keadaan yang sebenarnya. Jadi ontologi dalam

pengertian ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu atau ilmu yang mempelajari keadaan sebenarnya dari sesuatu.

Menurut Muhadjir (2001:57), objek telaah ontologi adalah yang ada. Studi tentang yang ada, pada tataran studi filsafat pada umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Istilah ontologi banyak digunakan ketika kita membahas yang ada dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, atau dalam rumusan Lorenz Bagus: menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.

Menurut Suriasumantri (1990) landasan ontologis: Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan.

Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi telaah monisme, paralelisme, atau pluralisme. Bagi pendekatan kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme,

idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme. Terdapat juga ontologi yang menolak yang ada yang supernatural, menolak yang mental, dan menolak universal platonik. Ontologi tersebut disebut ontologi naturalistik, yang berkembang pesat pada tahun 1960-an (Muhadjir 2001: 57—59).

Epistemologi

Setelah menyimak ontologi atau hakikat dari suatu yang ada, maka sampailah pada hakekat dari cara (teori) memperoleh pengetahuan (dan ilmu) atau pada **epistemologi**. Bagaimana cara agar sesuatu yang ada (atau yang terjadi) di “alam raya” ini menjadi pengetahuan dan atau ilmu? Apa sumber-sumbernya? Apa sebenarnya pengetahuan dan ilmu itu? Menurut Suriasumantri (1990), landasan epistemologi: Bagaimana proses yang memungkinkan yang ditimpanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu? Apa kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?

Ontologi berupaya mencari secara refleksi tentang yang ada. Sedangkan epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahihan dan kebenaran ilmu. Pembeneran tersebut dapat bermacam-macam, misalkan

pembenaran tradisional yaitu teori pembenaran yang berkembang pada 1970-an, yakni teori pembenaran yang terbagi dalam teori *koherentisme* dan *foundasionalisme*.

Para penganut *foundasionalisme* klasik berpendapat bahwa semua pengetahuan dan pembenaran yang ada semuanya berasal dari pada pengetahuan dan pembenaran *noninferensial*. Dalam hal ini pembenaran yang dimaksudkan adalah pembenaran yang memiliki struktur linier dan dalam keterkaitan satu dan lainnya. Pembenaran *koherentisme* memandang bahwa yang diyakini itu tidak terlepas dari lingkaran semua yang diyakini. Menurut teori ini sesuatu yang diyakini itu tidak terlepas dari keseluruhan sistem yang diyakininya, sehingga pembenaran terhadap sesuatu yang diyakini, dapat dilacak keterkaitannya dengan keseluruhan sistem yang diyakininya.

Pembenaran *evidentialisme* dan *naturalisme* yaitu teori pembenaran yang berkembang pada 1980-an. Hasil diskusi para ahli, teori pembenaran terbagi atas teori *internal* dan *eksternal*.

Para pendukung teori *internal* berpendapat bahwa pembenaran itu ditentukan oleh faktor-faktor *internal* dalam mental seseorang, penganut faktor *internal* disebut dengan *evidentialist*, bagi *evidentialist* pembenaran itu dibangun oleh persepsi kita, oleh mental kita. Bagi *evidentialist*

pembenaran yang diyakini itu diperoleh karena adanya dukungan *evidensi*. Sedangkan para pendukung teori *eksternal* berpendapat bahwa banyak faktor dari luar yang sangat mempengaruhi penganut faktor ini disebut dengan *naturalisme*.

Pembenaran subjektif dan pragmatik, pembenaran subjektif memberikan implikasi pada standar rasional yang berarti bahwa sesuatu yang diyakini sebagai benar itu tentunya memiliki sifat reliabel, *ajeg*. Bila *ajeg* sebagai standar, maka para reliabilis itu pada hakekatnya adalah objektivis. Sebaliknya, karena yang diyakini benar tersebut perlu terolah secara reflektif, maka sifatnya menjadi kembali subjektif.

Pembenaran moral dan religius, yakni pembenaran dengan menelaah evaluasi epistemik tentang keputusan moral dan teori-teori moral. Meski pembenaran moral membahas juga *metaethik*, tetapi karena perkembangan *metaethik* telah mengarah ke telaah pada makna, bukan pada moral, maka menjadi kehilangan arah. *Ethik* normatif telah bergeser mempertanyakan makna yang membekukan perkembangan epistemologi moral itu sendiri.

Pembenaran religius berkembang pada tataran kehidupan religius sehari-hari dan berupaya untuk membuat penafsiran kitab suci untuk memperoleh tuntunan terpercaya. Dalam *fideisme* keyakinan religius tidak dievaluasi secara rasional, melainkan diyakini

sebagai bagian paling mendasar dari pandangan hidup seseorang.

Kebenaran epistemologik yakni para ilmuan terdahulu yang dapat menampilkan teori secara berkelanjutan, disanggah atau dimodifikasi atau diperkaya oleh ilmuwan berikutnya. Kebenaran-kebenaran yang ditampilkan berupa teori yang bersifat kondisional, sejauh mediannya demikian, sampelnya itu, desainnya demikian dan seterusnya. Dengan demikian, kebenaran yang diperoleh dengan cara kerja demikian adalah kebenaran epistemologik. (Muhadjir, 2001: 60-63).

Aksiologi

Menurut Suriasumantri (1990), Landasan aksiologi: Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara pengetahuan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral / profesional?

Pada hal tersebut aksiologi merupakan suatu proses di mana ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga kejujuran dengan menjunjung tinggi kebenaran secara ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak. Tradisi Barat meletakkan sangat dominan peran

empiris dan rasionalitas indriawi. Sesuatu yang berada di balik yang empiris dan di balik yang rasional indriawi hampir selalu disepakati sebagai tidak valid sebagai ilmu. Dalam konteks menegasi, sementara ahli tegas-tegas menolak yang trasenden sebagai ilusi atau fiksi, yang lain menampilkan sebagai misteri yang tak terjangkau oleh ilmu, yang tidak dapat dibuktikan sebagai ada atau tidak ada. Dalam konteks mendegradasi, sementara ahli menurunkan makna moral menjadi kemestian untuk kebaikan diri dan masyarakat (Muhadjir, 2001: 65).

Menurut Suriasumantri (2000: 244), proses menemukan kebenaran secara ilmiah mempunyai implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Karakteristik proses tersebut merupakan kategori moral yang melandasi sikap etis seorang ilmuwan. Kegiatan intelektual yang meninggikan kebenaran sebagai tujuan akhir, mau tidak mau mempengaruhi pandangan moral. Kebenaran berfungsi bukan saja sebagai jalan pikiran, namun seluruh jalan hidupnya. Dalam usaha masyarakat untuk menegakkan kebenaran inilah maka seorang ilmuwan terpanggil oleh kewajiban sosialnya, bukan saja sebagai penganalisis materi kebenaran tersebut namun juga sebagai protipe moral yang baik.

Etika yang dapat menjadi hal utama dalam proses pengembangan cara berpikir dan pengembangan ilmu, merupakan suatu sikap tauladan yang harus di miliki oleh

setiap ilmuwan dalam menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan.

Di bidang etika tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun memberi contoh. Dia harus tampil di depan, bagaimana caranya bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggapnya benar, dan kalau perlu berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini, beserta sifat-sifat lainnya yang tak disebutkan di sini, merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Di tengah situasi di mana segenap nilai mengalami kegoncangan, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan. Pengetahuan yang dimilikinya merupakan kekuatan yang akan memberinya keberanian. Demikian juga dalam masyarakat yang sedang membangun, maka dia harus bersikap sebagai seorang pendidik dengan memberikan suri tauladan (Suriasumantri, 2000 : 244).

Dalam aksiologi terdapat kebenaran tunggal. Menurut Muhadjir (2001 : 67—68), kebenaran tunggal merupakan telaah yang dimaksudkan untuk menyimpulkan ringkas ontologi, epistemologi, dan aksiologi guna menjangkau masa depan yang lebih prospektif. Fenomena sensual, logik, ataupun moral yang tidak dapat disangkal memang plural. Dimensi plural pada substansi tunggal. Dengan berpikir reflektif menjadikan berpikir induktif dan deduktif

dipadukan. Kognisi, afek, dan psikomotor diganti kognisi, afek dan amalan dapat menjadikan tampilan psikologi menjadi human. Pengembangan teknologi menjadikan ilmu berorientasi pada hakekat objektif ilmu dengan kepentingan subjektif manusia, baik untuk menjangkau tataran sensual, logik, maupun moral menjadikan ilmu tampil tunggal mendukung kepentingan manusia. Memadukan konsep dan praktik menjadi praksis yang momot ide, nilai sensual, logik, dan moral membuat ilmu menjadi tunggal. Kebenaran tunggal yang hakiki merupakan kebenaran substantif dan kebenaran essensial, yang tampil sebagai keteraturan substantif dan keteraturan esensial semesta, yang sifatnya objektif universal. Dalam pengakuan pada kebenaran transendensi keteraturan substansial dan essensial itu merupakan *al Haq min Rabbika*.

Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakekat ilmu (pengetahuan ilmiah). Juga merupakan telaah secara filsafat, yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakekat ilmu, seperti yang diungkapkan oleh Suriasumantri, terdiri dari landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologi. The Liang Gie (1997) setelah memaparkan definisi-definisi filsafat ilmu para filsuf memahami bahwa filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap

persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Landasan ilmu yang dimaksud mencakup :

- a. konsep-konsep pangkal
- b. anggapan-anggapan dasar
- c. asas-asas permulaan
- d. struktur-struktur teoritis
- e. ukuran-ukuran kebenaran ilmiah

Dari pengertian tersebut, secara ontologis filsafat ilmu dapat digolongkan menjadi empat konsepsi berikut, seperti disimpulkan seorang filsuf pengamat sejarah John Losee.

1. filsafat ilmu yang berusaha menyusun pandangan-pandangan dunia yang sesuai
2. filsafat ilmu yang berusaha memaparkan penanggapan dan kecenderungan para ilmuwan (misalnya dalam alam semesta mempunyai keteraturan)
3. filsafat ilmu sebagai salah satu cabang pengetahuan yang menganalisis dan menerangkan konsep dan teori dari ilmu
4. filsafat ilmu sebagai pengetahuan kritis derajat kedua yang menelaah ilmu sebagai sasaran.

Konsep ini membagi tingkatan pengetahuan manusia menjadi tiga tingkatan:

- Tingkat 0: fakta-fakta
- Tingkat 1: penjelasan mengenai fakta-fakta ini dilakukan oleh ilmu

- Tingkat 2 : analisis mengenai prosedur dan logika dari penjelasan ilmiah

Pandangan yang pertama mengatakan bahwa akan mesti mengakui preposisi tanpa mencari dalil-dalil bukti kebenarannya. Akal secara alami harus mempercayainya tanpa bukti dan penetapan apapun, karena memang telah demikian adanya. Misalnya, pada preposisi bahwa penyangkalan dan pembenaran tidak dapat terjadi tanpa sesuatu sebab, ataupun keseluruhan lebih besar dari bagian-bagian.

Pandangan kedua, bahwa dalam informasi pengetahuan teoretik, akal merupakan tindakan preposisi tersebut tergantung pada proses pemikirannya dan panggilan dari kebenaran-kebenaran yang mendahuluinya, dan itu terlalu jelas lebih pasti kebenarannya.

Ilmu Administrasi

Menurut Siagian (1989:3), administrasi didefinisikan sebagai “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas. *Pertama*, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui adanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. *Kedua*, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua

manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ke dalam golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu, tempat, peralatan materi serta perlengkapan lainnya. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia, (Siagian 1989 : 3).

Administrasi Ditinjau dari Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis

Seperti telah diungkapkan di atas bahwa administrasi itu timbul bersama-sama dengan peradaban manusia, akan tetapi dalam hal ini administrasi belum dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Administrasi sebagai suatu ilmu pada saat adanya pemerintahan yang membutuhkan proses kerja dalam mencapai tujuan (Siagian 1989 : 1). Charles A. Beard, seorang historikus politik yang terkenal dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh Albert Lepawsky, dalam bukunya *Administration* pada 1937, berkata bahwa "tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan malahan kelangsungan hidup dari peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk

membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern.

Administrasi sebagai suatu proses, di mana pengertian sesuatu proses adalah sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui. Dengan demikian proses administrasi adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

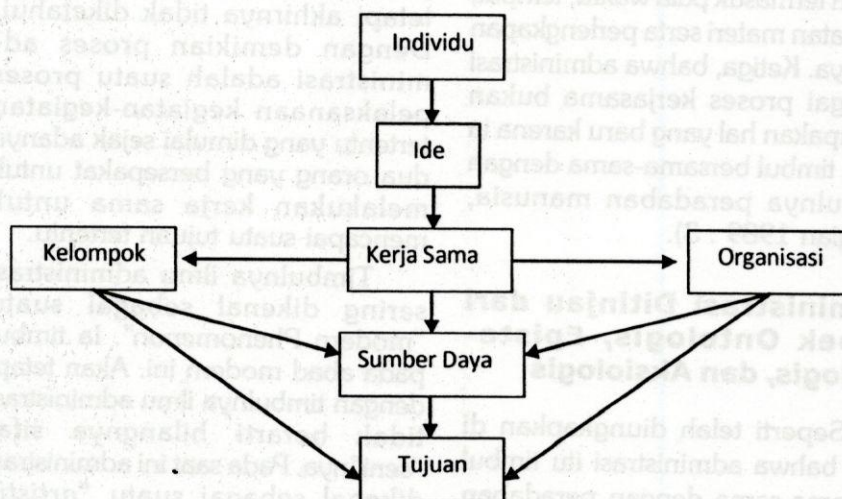
Timbulnya ilmu administrasi sering dikenal sebagai suatu "modern Phenomenon". Ia timbul pada abad modern ini. Akan tetapi dengan timbulnya ilmu administrasi tidak berarti hilangnya sifat "seni" nya. Pada saat ini administrasi dikenal sebagai suatu "artistic science", karena dalam penerapan "seninya" masih tetap memegang peranan yang menentukan. Sebaliknya, seni administrasi dikenal sebagai suatu "scientific art" karena seni itu sudah didasarkan atas sekelompok prinsip-prinsip yang telah teruji "kebenarannya". Sebagai ilmu, administrasi yang "lahir" sekitar satu abad yang lalu, sudah memiliki prinsip, rumus, dalil dan kaidah yang sifatnya universal mondial, yang sebagai ilmu terapan, penggunaannya dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan bukan adoptif karena selalu dipengaruhi oleh faktor situasi, kondisi, waktu, dan ruang.

Secara garis besar konsep administrasi terdiri atas tiga macam bentuk berikut.

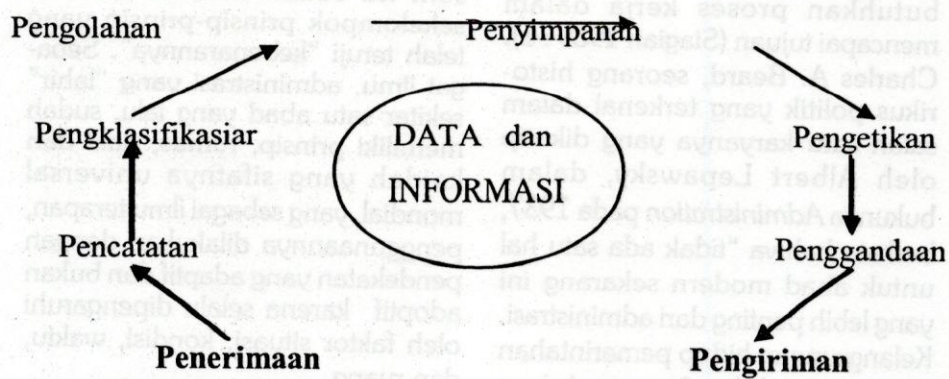
1. Administrasi lebih luas dari manajemen

Ruang lingkup administrasi mencakup keseluruhan kegiatan pemerintahan sehingga kegiatan administrasi sangat

luas pada segi-segi kehidupan masyarakat. Teori ini banyak dianut oleh kelompok orang yang bekerja pada pemerintahan.



Bagan 1
Karakteristik elemen fenomena administrasi



Bagan 2
Rangkaian aktivitas tata usaha

2. Administrasi sama dengan manajemen

Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa antara administrasi dan manajemen tidak terdapat perbedaan yang sangat mencolok, sebab apabila diperhatikan dari kegiatan yang dilakukan atau proses kerja keduanya hampir sama, hanya ruang lingkup pekerjaan yang berbeda.

3. Administrasi lebih kecil dari manajemen

Pengertian tersebut dapat ditemukan administrasi menurut para ilmuwan dari Belanda, yang hanya mengartikan bahwa administrasi merupakan kegiatan surat-menyurat, ketik mengetik, pengarsipan. Sehingga ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh administrasi sangat kecil jika dibandingkan dengan manajemen. Paham ini banyak dianut oleh para ahli-ahli bisnis atau manajemen, yang menganggap bahwa manajemen lebih luas dari administrasi.

Pemahaman yang tepat tentang fokus analisis ilmu administrasi menjadi sangat penting karena hanya dengan demikianlah ilmu administrasi dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, khususnya ilmu-ilmu sosial ke dalam mana ilmu administrasi termasuk. Administrasi pun mempelajari manusia. Segi kehidupan manusia yang menjadi objek ilmu administrasi yang tidak menjadi fokus

analisis ilmu sosial lain yang mana pun juga ialah manusia sebagai makhluk organisasional. Berarti bahwa segi apapun yang disoroti dalam mendalami ilmu administrasi seperti segi kelembagaan, sarana dan prasarana, fungsi-fungsi, proses administrasi, sumber daya manusia, mekanisme dan prosedur kerja, kesemuanya itu dikaitkan dengan manusia organisasional sebagai fokus analisis tersendiri dan khas yang tidak menjadi objek fokus analisis ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal senada dapat dikatakan mengenai ilmu administrasi niaga yang pencabangannya dapat dilihat dari pendekatan fungsional seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan sebagainya; kesemuanya itu disorot dari sudut pandang kepentingan manusia organisasional.

Ilmu Administrasi sebagai Objek Studi

Bahwa ilmu administrasi dapat diajarkan dan dipelajari juga merupakan kenyataan, baik pada tingkat program studi, jurusan, fakultas di lingkungan universitas dan institut, pada tingkat akademi dan sekolah tinggi. Kenyataan demikian merupakan pembuktian yang sangat kuat bahwa ilmu administrasi memang sudah diakui sebagai suatu disiplin ilmiah yang statusnya sama dengan ilmu-ilmu lainnya.

Merupakan kenyataan pula bahwa apabila seseorang yang mempelajari ilmu administrasi dinilai telah memiliki tingkat

pemahaman tertentu, kepadanya diberika gelar akademik sesuai dengan tingkat pemahaman tersebut sampai ketinggian gelar yang paling tinggi.

Memang tidak dapat disangkal bahwa teori, prinsip, rumus, kaidah dan rumus-rumus ilmu administrasi banyak dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya. Kenyataan demikian tidak memperlemah argumentasi tentang status ilmiah administrasi karena “praktek” demikian sudah merupakan fenomenon ilmiah modern yang berlaku bagi semua cabang ilmu pengetahuan dan bukan “monopoli” ilmu administrasi saja. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa pendalaman suatu disiplin ilmiah mutlak perlu menggunakan pendekatan yang sifatnya multi-disipliner.

Sesungguhnya peranan ilmu administrasi dalam tata kehidupan modern adalah sedemikian pentingnya sehingga ada ungkapan yang berkata bahwa “tidak ada lagi yang lebih penting dalam tata kehidupan modern dari administrasi karena langgeng tidaknya suatu pemerintahan yang beradab dan lestari tidaknya peradaban manusia akan sangat tergantung pada kemampuan manusia mengembangkan filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia modern.

Administrasi memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri untuk disebut sebagai ilmu (The Liang Gie, 1980. Dalam Ulbert Silalahi 2002 : 76—77), yaitu

empiris, sistematis, objektif, analitis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Administrasi bersifat empiris, sebab eksistensi, perkembangan dan penerapannya didasarkan atas pengamatan-pengamatan dan percobaan-percobaan empiris, sehingga menimbulkan aneka pendekatan, seperti pendekatan proses, perilaku, sistem, dan kontigensi.

Administrasi bersifat sistematis, sebab keseluruhan tindakan dan aktivitas serta proses administrasi merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, berurutan serta tersusun dalam satu kesatuan fungsi yang saling berhubungan, saling mempengaruhi bagi tercapainya tujuan.

Administrasi bersifat objektif, oleh karena analisis dan telaahannya bebas dari prasangka dan keinginan pribadi penganalisis atau penelaah. Dengan demikian mencerminkan atau menggambarkan best thinking dari realita objek atau gejala yang diamati dan diteliti. Objektivitas ilmu mensyaratkan kesesuaian realita objek tanpa ada penyimpangan oleh subjektivitas dari yang meneliti.

Administrasi bersifat analitis, sebab memperlihatkan spesifikasi atau spesialisasi atas berbagai bidang atau objek telaahan dalam memahami berbagai sifat, fungsi dan aktivitas kerja sama (organisasi) menurut bidangnya masing-masing, seperti bidang administrasi

negara (*public administration*) dan bidang administrasi niaga (*business administration*).

Administrasi juga dapat dibuktikan kebenarannya karena seluruh proses kegiatan dan dinamika kerja sama administrasi ditujukan ke arah terciptanya efisiensi dan efektivitas yang dapat diuji berdasarkan *output* (keluaran) seperti biaya, tenaga dan waktu yang dipergunakan. Sebaliknya, apabila terjadi inefisiensi dan inefektivitas pencapaian tujuan, itu berarti, teori, prinsip-prinsip dan metode yang dipergunakan dalam proses kegiatan dan dinamika kerja sama tidak atau kurang tepat.

Karena administrasi memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai ilmu, maka jelaslah bahwa administrasi adalah ilmu dan dalam kedudukannya sebagai ilmu, administrasi tergolong sebagai ilmu sosial dalam kategori *applied science* (ilmu terapan), karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan peri kehidupan manusia.

Menurut Siagian (1989 : 23—25), ditinjau dari segi penahapan perkembangan ilmu administrasi, sejak lahirnya hingga sekarang ilmu administrasi telah melewati empat tahap, yaitu :

1. Tahap survival (1886—1930)

Tahun 1886 sering dikatakan sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah “gerakan manaje-

men ilmiah” dimulai oleh Frederick Winslow Taylor.

2. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan (1930—1945)

Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat lagi dibantah. Dalam jangka waktu ini pulalah gelar-gelar keserajaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

3. Tahap *human relation* (1945—1959)

Tahap ini disebut tahap *human relation* karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para ahli dan sarjana mulai beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal apa yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis.

4. Tahap *behaviouralisme* (1959 — sekarang)

Pengertian terhadap semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan menga-

kibatkan para ahli dan sarjana memusatkan penyelidikannya dalam masalah manusia kerja ini. Akan tetapi karena pada hakekatnya tahap terakhir ini masih merupakan sorotan perhatian bukan lagi manusia-nya sendiri sebagai makhluk hidup yang mempunyai mar-tabat, kepribadian, tujuan, cita-cita serta keinginan yang khas, akan tetapi sudah meningkat kepada penyelidikan tentang tindak tanduk manusia dalam kehidupan berorganisasi dan apa alasan-alasan mengapa manusia itu bertindak demikian. Jika tindak tanduk itu merugikan organisasi, diselidiki pula bagaimana caranya agar supaya tindakan yang merugikan itu dapat dirubah menjadi sikap yang menguntungkan organisasi. Jika sebaliknya tindak tanduk itu sudah menguntungkan organisasi, diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan yang demikian demi tercapainya tujuan organisasi dengan lebih efisien, ekonomis dan efektif.

Karena administrasi tergolong ilmu sosial dalam kategori *applied science* (ilmu terapan), sehingga dalam penerapannya administrasi memiliki kaitan atau hubungan dengan ilmu sosial lainnya.

- Administrasi dengan Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari perca-

turan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya administrasi adalah "*policy execution*". Policy yang dimaksud adalah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskannya sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonardo D. White, dalam bukunya, *Introduction to the Study of Public Administration*, pernah berkata bahwa "apabila politik berakhir, administrasi pun mulai". Dengan demikian administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuitas dari yang lain (Siagian, 1989:26). Di samping itu administrasi adalah bagian dari proses politik, di mana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai politik dan dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat diselenggarakan. Hal yang demikian itu dapat dipahami, karena administrasi negara berasal dari ilmu politik (Silalahi, 2002 : 85).

- Administrasi dengan Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas yang terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi

pada hakekatnya tidak terbatas sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda hanya ditinjau dari segi objeknya saja (Siagian 1989:25). Antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan bahkan kadang-kadang sering *overlapping* (tumpang tindih) antara yang satu dengan yang lain. Dilihat dari prinsip ekonomi dan prinsip administrasi, maka keduanya adalah sama, yakni masalah efisiensi dan efektivitas. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan sebaliknya, ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi hingga tercapainya tujuan yang direncanakan.

Selanjutnya, ahli-ahli ekonomi (*economics*) telah banyak menyumbang untuk administrasi dalam hal meramalkan (*forecasting*) dan pembuatan keputusan (*decision making*). Usaha mereka dalam hal memaksimalkan sumber daya-sumber daya telah terlihat dengan sendirinya dalam menganjurkan administrator-administrator tentang cara-cara yang lebih efektif untuk menyesuaikan keadaan di luar dan melalui pemberian input memperbaiki pembuatan keputusan di dalam organisasi (Silalahi, 2002: 86—87).

- Ilmu Administrasi dengan Psikologi dan Psikologi Sosial

Ilmu jiwa (psikologi), yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang. Seseorang hanya dapat digerakkan dengan baik apabila administrator yang menjadi atasannya mengenal jiwa orang tersebut. Kejiwaan itu dapat dipelajari melalui ilmu jiwa terutama ilmu jiwa umum, psikologi industri dan psikologi sosial (Siagian, 1989 : 26—27).

Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerja sama dari sekelompok orang-orang dalam mencapai tujuan, juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial (*social behaviour*). Perilaku individu yang melaksanakan kerja sama akan berpengaruh terhadap hasil (*out put*) yang dicapai. Meskipun tujuan yang akan dicapai sudah direncanakan sedemikian rupa, termasuk cara-cara untuk mencapainya, dengan sarana (*tools*) dan sumber (*resources*) yang lengkap, akan tetapi apabila tingkah laku orang yang bekerja sama tidak baik, misalnya tidak disiplin, boros, maka hasil atau tujuan yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Atau akan terjadi *ineficiency* dan ketidakefektifan pencapaian tujuan.

Secara khusus lagi dapat dikemukakan hubungan antara administrasi dengan psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari perilaku hubung-

an antara individu (*interpersonal behavior*) atau perilaku hubungan antara manusia (*human behavior*). Psikologi sosial mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi (Silalahi, 2002 : 87–88).

- Administrasi dengan Ilmu Antropologi

Antropologi, sebagaimana yang diketahui mempelajari tindak-tanduk individu dalam masyarakat. Telah berulang ditekankan bahwa manusia merupakan unsur terpenting di dalam suatu organisasi dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Jika demikian halnya secara logis jelas terlihat adanya persamaan objek kedua ilmu pengetahuan ini, hanya *approach* dan metode analisa yang berbeda.

Menyadari bahwa bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita dan hal ini merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi. Seperti kita lihat sebelumnya, perbedaan kebudayaan ada di dalam bangsa juga antar-bangsa-bangsa. Ada perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap dan norma-norma dalam penerimaan perilaku. Sistem penilaian yang bersifat individu – yang merupakan

prioritas terhadap apa yang penting – akan mempengaruhi sikap kita dan perilaku kita dalam kerja (Silalahi, 2002:89-90).

- Administrasi dengan Ilmu Ethnologi

Ethnologi, yakni merupakan ilmu yang mempelajari sifat, kebudayaan dan adat istiadat sesuatu bangsa perlu pula diketahui oleh ahli administrasi terutama mereka yang berkecimpung dalam kegiatan internasional (baik di bidang kenegaraan maupun di bidang perdagangan). Sasarannya ialah untuk mengetahui sifat-sifat kepribadian, kelemahan-kelemahan dan temperamen bangsa lain, itu karena dengan mengetahui hal-hal tersebut untuk menggerakkan mereka akan menjadi lebih mudah.

- Administrasi dengan Ilmu Sosiologi

Sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari tata bermasyarakat yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan administrasi dan management, karena administrasi “berdharma bhakti” kepada masyarakat, baik masyarakat kecil dalam lingkungan suatu organisasi, maupun masyarakat sebagai keseluruhan.

- Administrasi dengan Ilmu Sejarah

Sejarah, yang menyelidiki keseluruhan dari pada tindakan-tindakan manusia di

masa-masa yang lalu. Para sarjana administrasi dan manajemen hanya akan berhasil dalam melaksanakan tugasnya apabila mereka mengetahui sejarah secara mendalam. Manfaatnya ialah untuk dapat menarik pelajaran dan pengalaman masyarakat, bangsa dan pemerintahan yang lalu, agar segi-segi positifnya dapat lebih dikembangkan lagi dan segi-segi negatifnya tidak terulang kembali.

- Administrasi dengan Ilmu Hukum

Ilmu hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia "taat" pada hukum – tertulis atau tidak tertulis – yang berlaku (Siagian, 1989 : 25).

Ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup di dalam masyarakat memberi input yang besar dalam perkembangan studi administrasi. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila para anggota organisasi (pimpinan dan bawahan) menaati peraturan-peraturan organisasi; sedangkan perumusan

peraturan organisasi merupakan konsep-konsep yang diambil dari ilmu hukum. Disamping itu prosedur administratif (khususnya dalam bidang administrasi negara) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Silalahi, 2002 : 90).

- Administrasi dengan Ilmu Eksak

Statistik merupakan ilmu tentang data dan angka-angka. Salah satu tugas terpenting dari seorang administrator dan / atau manager ialah mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus tepat, praktis dan dapat dilaksanakan. Untuk memenuhi syarat-syarat keputusan yang demikian seorang administrator dan/ atau manager perlu memiliki data dan informasi yang lengkap, up to date, dapat dipercayai dan tersusun dengan sistematis. Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data dan informasi yang demikian itu hanya dapat dilakukan melalui statistik. Para ahli matematik dan statistik telah menyumbang dan memperkaya teori administrasi, yaitu dengan memberikan alat bantu untuk memperbaiki pembuatan keputusan (Siagian, 1989 : 27).

Demikian juga dengan ilmu teknik yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan administrasi yang dalam tahap awal kerja

pengolahan (manajemen) (khususnya selama seperempat abad pertama abad ini), terpusat sekitar efisiensi dengan program kerja dan prosedur kerja. Ilmu teknik menambah kemampuan dalam menyatukan kondisi kerja dengan kemampuan kerja manusia, dimana melalui usaha kerja mereka dalam pembuatan pola kerja, arus kerja dan prosedur serta pemilihan lokasi dan penggunaannya dapat mengurangi kelelahan kerja dengan efektif dan meningkatkan hasil-hasil kerja per kapita (Silalahi, 2002:91).

Administrasi tidak pernah beroperasi dalam kekosongan. Proses administrasi yang dimaksudkan untuk melayani masyarakat dalam usaha masyarakat itu memuaskan kebutuhannya. Setiap masyarakat mempunyai norma-norma tertentu yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Norma-norma, keadaan dan kondisi masyarakat itulah yang menentukan kepribadian masyarakat tersebut. Dengan mempelajari ekologi administrasi dapat diketahui ciri-ciri suatu sistem administrasi dari suatu masyarakat, bangsa dan negara tertentu dan selanjutnya dapat dipahami pula mengapa dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara itu telah tumbuh dan berkembang suatu sistem administrasi tertentu (Pamudji, 2002:11). Karena itu dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi dalam kegiatan sehari-

hari, faktor-faktor logis yang harus diperhatikan adalah :

1. Falsafah negara

Falsafah negara merupakan tali pengikat bagi seluruh warga negara. Karenanya administrasi pun dalam membina falsafah administrasi tidak boleh tidak harus menyelaraskan falsafah itu dengan filsafat negara sebagai keseluruhan. Artinya, filsafat administrasi harus merupakan falsafah negara yang diterapkan dalam bidang administrasi.

2. Sistem politik yang dianut oleh negara

Karena administrasi merupakan proses lanjutan dari politik, maka politik administrasi harus pula merupakan lanjutan politik negara. Bagi administrasi negara, misalnya, tidak ada netralitas politik karena politiknya harus seirama dengan politik negara. Demikian pula halnya di bidang keniagaan karena kegiatan-kegiatan keniagaan hanya boleh didasarkan kepada politik perekonomian negara.

3. Tingkat pembangunan ekonomi yang telah dicapai

Tingkat taraf kehidupan rakyat akan sangat menentukan apa yang mereka dapat kerjakan, apa sifat disiplin kerja yang hendak dilaksanakan, sistem prioritas apa yang hendak disusun, kesejahteraan sosial yang bagaimana yang harus dicapai serta pengarahan

- penggunaan sumber yang bagaimana yang harus disoroti.
4. **Tingkat pendidikan rakyat**
Tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh rakyat sebagai faktor ekologis berarti bahwa dalam proses komunikasi dalam administrasi harus diperhatikan gaya bahasa yang dipergunakan, cara penyampaian berita, instruksi, perintah, informasi dan bimbingan. Kalau tidak, maka besar kemungkinan proses komunikasi ini tidak akan berjalan dengan efektif.
 5. **Bahasa**
Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Tetapi di samping sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai pula peranan penting lainnya, yaitu sebagai tali pengikat dalam usaha membina persatuan dan kesatuan. Administratif, bahasa merupakan alat yang amat penting pula dalam usaha menciptakan suatu "frame of reference" yang sama dalam bidang administrasi.
 6. **Agama**
Salah satu faktor yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena manusia itu mampu beragama. Kemampuan beragama itu mengakibatkan manusia mempunyai martabat yang tinggi. Karenanya dalam menggerakkan bawahan yang beragama itu, perlu selalu diperhatikan
 7. **Letak (Geografi) negara**
Cara menjalankan administrasi akan berbeda pada suatu negara kepulauan, apabila dibandingkan dengan suatu negara daratan. Dua faktor penting yang mempengaruhi, yaitu faktor komunikasi dan transportasi. Jika seseorang menghubungkan pelaksanaan suatu keputusan dengan faktor komunikasi dan transportasi, kiranya tidak akan terlalu sukar untuk menemukan hubungan tersebut.
 8. **Struktur masyarakat**
Suatu hipotesa yang dapat dibuat dalam hubungan struktur masyarakat ialah bahwa proses administrasi lebih mudah dijalankan dalam suatu masyarakat yang homogen dibandingkan dengan suatu masyarakat yang heterogen. Jika demikian halnya maka struktur masyarakat sebagai faktor ekologis menentukan pula sifat dan ruang lingkup dari administrasi yang dijalankan. (Siagian, 1989:28-29).
 9. **Keadaan dan kekayaan alam**
Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Untuk keperluan ini telah terbentuk

seperangkat administrasi negara yang terhimpun dalam departemen dengan komponen-komponennya. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real, misalnya air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga, tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi, dan seterusnya (Pamudji, 2002 : 70).

10. Militer atau pertahanan dan keamanan

Pengaruh militer terhadap administrasi negara, yakni pemantapan prinsip-prinsip organisasi, telah diketahui bahwa pembagian lini dan staf merupakan asas pembagian fungsi yang telah lama dianut oleh militer, sehingga dikenal adanya fungsi lini (*line function*) dan fungsi staf (*staff function*) (Pamudji, 2002 : 138).

11. Hukum

Otoriterisme yang sesuai dengan perjalanan republik ini membuat sistem administrasi juga sangat bergantung pada penguasa, bukan pada kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pada gilirannya implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh administrator lebih

mengikuti kemauan birokrat ketimbang kemauan sistem administrasi itu sendiri yang mestinya berfihak pada publik. Tidak mengherankan jika manajemen pelayanan publik yang disuguhkan menjadi alur yang terbalik, mestinya rakyat yang dilayani oleh birokrasi tetapi sebaliknya birokrasi yang justru meminta dilayani oleh rakyat. Dampak kebijakan pemerintah di bidang hukum ini masih terasa sampai kini dengan bukti praktek korupsi, manipulasi, kolusi dan nepotisme masih bersimaharajalela (Indarwanto, 2001:73-74).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ontologi sebagai hakikat sesuatu yang ada dengan keadaan yang sebenarnya bermula dari yang ada sebelumnya yaitu kebenaran yang mutlak dari sesuatu (Tuhan yang diwahyukan kepada manusia), sehingga manusia itu mempunyai ilmu untuk selanjutnya dikembangkan berdasarkan alat (indera) yang diciptakan oleh Tuhan.
2. Epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahuan dan kebenaran ilmu. Sehingga dapat menimbulkan membenaran-pembenaran terhadap apa yang diyakini itu

cukup untuk disebut ilmu. Oleh karena itu pembenaran yang diungkapkan secara epistemologi bermacam-macam tergantung pada ruang dan waktu, apabila teori pembenaran tersebut masih relevansi dengan kondisi pada waktu itu maka ia akan terus dipergunakan, tetapi apabila tidak sesuai lagi dengan waktu dan kondisi maka akan ditinggalkan. Serta dilakukan penemuan/ penelitian baru sehingga melahirkan pembenaran yang baru.

Aksiologi merupakan suatu proses di mana ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga kejujuran dengan menjunjung tinggi kebenaran secara ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak. Kebenaran yang diperoleh harus dibarengi dengan kejujuran, sehingga akan mempengaruhi moralitas di dalam mengungkapkan dan menyampaikan kebenaran. Etika dalam mengungkapkan kebenaran dapat menjadi hal utama dalam proses pengembangan cara berpikir dan pengembangan ilmu. Dalam pengakuan pada kebenaran transendensi keteraturan substansial dan essensial itu merupakan *Al haq min Rabbika*.

Di samping itu, administrasi sebagai ilmu juga memiliki sifat-sifat dan landasan pendekatan ilmiah :

1. Landasan ontologis

Yakni objek yang diamati terpisah dari subjek yang

mengamati. Objek yang diamati oleh ilmu administrasi adalah kegiatan dan dinamika kerja sama sekelompok orang yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai fenomena sosial.

2. Landasan epistemologi

Metode pendekatan yang digunakan dan bagaimana menerapkan metode ilmiah yang berkenaan dengan cara untuk mengamati sesuatu. Administrasi dalam mempelajari dan mengamati objek mempergunakan pendekatan-pendekatan (*aproaches*), misalnya dengan cara :

- a. *constitucional – legal – historical aproach*
- b. *structural – descriptive aproach*
- c. *social – psycological aproach / behavioral aproach*

Yang jelas, bahwa pengembangan administrasi sebagai ilmu dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain pendekatan proses, pendekatan sistem, pendekatan perilaku dan pendekatan kontigensi. Sedangkan untuk menganalisis fenomena administratif dapat dilakukan melalui metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis khusus (*case atau experimental analysis*).

3. Landasan aksiologi

Yakni tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Dalam hal administrasi yang mengamati dan menjelaskan proses kegiatan dan dinamika kerja sama untuk mencapai tujuan kelompok orang (organisasi), tidak sekedar usaha bagaimana agar tujuan tercapai, akan tetapi lebih mengutamakan efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu ilmu administrasi

mengajarkan konsep kerja sama yang afektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Pengembangan dan penerapan ilmu administrasi sebagai ilmu terapan, tidak terlepas lepas dari pengaruh ilmu yang lain sebab pada ilmu administrasi yang sangat diperhatikan adalah manusia, karena akan dapat meningkatkan perikehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi atau Metafisika Umum*. Kanisius, Yogyakarta
- Indarwanto, 2001, *Toeri Administrasi Publik dan Birokrasi (Perspektif Transendental)*. Taroda, Malang.
- Muhadjir, H. Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu : Positivisme, Post Positivisme, Dan Post Modernisme*. Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Pamudji, S, 2002, *Ekologi Administrasi Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Praja, Juhaya S, 1993, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Piara, Bandung
- Siagian, Sondang P, 1989, *Filsafat Administrasi*. Haji Masagung, Jakarta
- Suriasumantri, Jujun S. 1992, *ilmu dan Perspektif*. Obor Indonesia, Jakarta
- , 2000, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 2002, *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- The Liang Gie, 1997, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta.

*) **Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd.** adalah Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor